

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN TEORETIS TERKAIT PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD	
A. Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.....	19
1. Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Dalam Lembaga Perwakilan Rakyat	19
2. Demokrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD	24
3. Pemilihan Umum Calon Anggota DPD	28
4. Penafsiran Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu	

Anggota DPD	30
B. Penyelesaian Hukum Masalah Pencalonan Perseorangan	
Peserta Pemilu Anggota DPD	34
1. Penyelesaian Hukum Masalah Pencalonan Perseorangan	
Peserta Pemilu Anggota DPD Melalui Kewenangan	
Kekuasaan Kehakiman	34
2. Penyelesaian Hukum Masalah Pencalonan Perseorangan	
Peserta Pemilu Anggota DPD Berdasarkan Kepastian	
Hukum	39
 BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN MAHKAMAH	
 KONSTITUSI TERKAIT PERMASALAHAN PENCALONAN	
 PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD	
A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018	41
1. Kronologi Kasus	41
2. Identitas Pemohon	44
3. Proses Persidangan	44
a. Alasan Pemohon dalam Permohonan	44
b. Petitum	45
c. Keterangan Komisi Pemilihan Umum	46
4. Pertimbangan Hukum Hakim	48
5. Amar Putusan	49
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 ...	50
1. Kronologi Kasus	50
2. Identitas Pemohon	53

3. Proses Persidangan	53
a. Alasan Pemohon	53
b. Petitum	55
c. Keterangan Ahli Pemohon	55
d. Keterangan Pemerintah	57
4. Pertimbangan Hukum Hakim	59
5. Amar Putusan	60
C. Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi Menurut Informan	61
1. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi	61
2. Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi	63
3. Akibat dan Saran Perbedaan Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi	69

BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM MENGENAI PERBEDAAN

ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENCALONAN

PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD

A. Analisis Mengenai Dasar Hukum Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD	73
B. Analisis Mengenai Kepastian Hukum Berdasarkan Kewenangan Lembaga Terkait Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	